

## **URUSAN PERUMAHAN**

### **1. DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROV. JATIM**

#### **1) Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah**

##### **a) Tujuan**

Program ini bertujuan meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi secara optimal, efisien dan berkelanjutan, meliputi :

- Pembangunan sarana air minum di perkotaan dan perdesaan, meliputi bangunan produksi sampai jaringan distribusi
- Pendataan dan identifikasi potensi air baku untuk air minum dan pengembangan pemanfaatan sumber air secara terintegrasi lintas Kabupaten/Kota
- Pemulihan sarana air minum dan sanitasi yang rusak akibat bencana alam
- Revitalisasi dan perbaikan sarana air minum untuk menunjang peningkatan pemeliharaan guna pengendalian kebocoran revitalisasi IPAL/IPLT dan rintisan pengembangan jaringan pembuangan air limbah di perkotaan
- Pembangunan sarana sanitasi dasar bagi rumah tangga maupun komunal di perdesaan, terutama di kawasan permukiman masyarakat miskin
- Menunjang pelaksanaan penyehatan PDAM
- Menunjang pelaksanaan pembinaan teknis dan manajemen bagi HIPPAM
- Fasilitasi kerjasama instansi pengelola air minum dan air limbah dengan swasta

## **b) Sasaran**

Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah

- Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih di perkotaan dari 56,79% menjadi sebesar kurang lebih 59,95%, dan di pedesaan dari 49,89 % menjadi sebesar kurang lebih 50,43%.
- Meningkatnya jumlah IPAL/IPLT yang dapat dimanfaatkan 40%
- Meningkatnya cakupan pelayanan Air Limbah di perkotaan dari 73,88% menjadi sebesar kurang lebih 74,28%, dan di pedesaan dari 43,90 % menjadi sebesar kurang lebih 44,78%.
- Meningkatnya kinerja lembaga pengelola air minum (PDAM & HIPDAM) dan lembaga pengelola air limbah
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah
- Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar sektor dan antar wilayah dalam pembangunan air minum dan air limbah
- Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pembangunan air bersih dan air limbah

## **c) Pagu dan Realisasi Program**

Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah, pagu sebesar Rp. 27,435,000,000.00 dengan realisasi Rp. 25,340,323,900.00 (92,36%) secara rinci realisasi perkegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

## **d) Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan**

Cakupan pelayanan air bersih saat ini sebesar 56,79%, untuk wilayah perkotaan, dan 59,95% untuk daerah pedesaan, pada akhir tahun 2015 cakupan pelayanan wilayah perkotaan akan ditingkatkan menjadi 84,93% dan cakupan pelayanan wilayah pedesaan akan ditingkatkan menjadi

65,83% Target MDG's 2015 akan mengurangi separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman dan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai agenda tersebut menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM yaitu:

- Meningkatkan cakupan layanan akses air bersih dan kualitas pelayanan secara konsisten dan bertahap utamanya pada masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR )
- Menurunkan tingkat kehilangan air melalui perbaikan dan rehabilitasi.
- Memprioritaskan pembangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR).

Cakupan pelayanan Sanitasi. sampai saat ini akses masyarakat terhadap layanan sanitasi permukiman (air limbah domestik), sampah rumah tangga dan drainase lingkungan masih relative rendah. Beberapa hal yang menjadikan penyebab rendahnya akses sanitasi ini, mulai dari kurangnya perhatian Pemerintah akan pentingnya sanitasi yang sering mengakibatkan pembangunan sanitasi belum menjadi salah satu prioritas Pembangunan dari Pemerintah, hingga rendahnya kebutuhan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Rendahnya akses masyarakat terhadap layanan Sanitasi bila dilihat lebih jauh akan berdampak luas seperti penurunan kualitas lingkungan hidup termasuk pencemaran sumber air bersih, peningkatan penderita sakit yang ditimbulkan dari buruknya sanitasi,serta menurunnya kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah dalam pengelolaan Sanitasi di Daerah, terutama untuk menghindari dampak dari kondisi buruknya Sanitasi Permukiman, yaitu dengan meluncurkan Program Pembangunan Sanitasi Permukiman yang juga disebut Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

Program Pecepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), adalah Program untuk meningkatkan dan mempercepat perencanaan dan investasi sektor Sanitasi yang dilaksanakan Selama periode tahun 2009 - 2014, dengan target pada akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- Stop buang air besar sembarangan (BABS), baik di wilayah perkotaan maupun wilayah Pedesaan
- Pengurangan genangan air.

Program Kegiatan Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

- Penyediaan sarana air bersih dan air limbah (Pembangunan / Rehabilitasi sarana sanitasi) di Kabupaten Lumajang, Pasuruan, Situbondo, Probolinggo, Malang, Bondowoso, Bangkalan, Nganjuk, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Blitar, Jombang, Bojonegoro, Kediri, Sumenep, Kota Madiun, Surabaya.
- Pembangunan sarana air bersih di pedesaan di Kabupaten Situbondo, Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, Malang, Bangkalan, Jember, Bondowoso, Ngawi, Magetan, Madiun, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Nganjuk, Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Sidoarjo, Jombang, Pamekasan, Sumenep, Sampang, Kota Blitar

#### **e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya**

##### **Permasalahan**

- Rendahnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan.
- Rendahnya kualitas manajemen pengelolaan air minum yang dilakukan oleh PDAM.
- Stagnasi dalam penurunan tingkat kebocoran air (teknis maupun non teknis).

- Permasalahan tarif air minum yang tidak mampu mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat mencapai kondisi pemulihan biaya (cost recovery).
- Pada beberapa daerah terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non air bersih, maupun karena kendala batas administrasi wilayah.
- Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.
- Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (sistem sewerage) di perkotaan.
- Belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah. Pengolahan lumpur tinja belum efektif karena masih rendahnya pemanfaatan sarana APLT yang sudah terbangun.

#### **Upaya Pemecahan Masalah**

- Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum dan air limbah hingga tahun 2011 di perkotaan dan perdesaan
- Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan air minum dan air limbah untuk masyarakat
- Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum dan air limbah sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku)
- Meningkatkan kinerja pengelola air minum dan air limbah melalui restrukturisasi kelembagaan

- Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan air minum dan air limbah melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan

NO.	SASARAN/INDIKATOR	2010		2011	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Drainase	50 Km	50,39 Km	10 Km	11,91 Km
	Luas Genangan yang tertangani	151 Ha	151,78 Ha	34 Ha	35,74 Ha
2.	Air bersih perpipaan	11 Km	11,49 Km	18 Km	19,69 Km
3.	Sanitasi (MCK)	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit
4.	Pelayanan Air Minum Perkotaan	56,50 %	56,79 %	56,70 %	59,95 %
	Pelayanan Air Minum Pedesaan	49,50 %	49,89 %	49,90 %	50,43 %
5.	Pelayanan Air Limbah Perkotaan	73 %	73,88 %	73,80 %	74,28 %
	Pelayanan Air Limbah Pedesaan	43,50 %	43,90 %	44 %	44,78 %
6.	Pelayanan Persampahan Perkotaan	79 %	79,53 %	79,50 %	88,84 %
7.	Pelayanan Drainase Perkotaan	77 %	77,27 %	77,20 %	79,82 %

## 2) Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Persampahan dan Drainase

### a) Tujuan

Program ini bertujuan meningkatkan cakupan pelayanan persampahan berkurangnya luasan wilayah tergenang, meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna, serta meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan dan drainase, antara lain meliputi :

- Peningkatan kualitas pengelolaan sampah, meliputi pengelolaan dan pembuangan akhir
- Pembangunan dan normalisasi saluran drainase primer dan sekunder lintas Kabupaten/Kota, untuk menunjang pengendalian banjir di perkotaan
- Revitalisasi dan peningkatan operasional tempat pembuangan akhir (TPA)
- Pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan sampah

- Fasilitasi kerjasama pengelolaan sampah terpadu untuk kota-kota besar dan metropolitan
- Pembinaan teknis dan manajemen pengelolaan sampah dan drainase
- Fasilitasi kerjasama pengelolaan dengan swasta berdasarkan konsep business plan
- Fasilitasi pengembangan pengelolaan sampah dan drainase yang berbasis masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

#### **b) Sasaran**

- Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan diperkotaan dari 79,53 % menjadi sebesar kurang lebih 79,65%
- Meningkatnya kinerja pengangkutan dan pengelolaan TPA sampah
- Meningkatnya fungsi saluran drainase sebagai pematus air hujan
- Menurunnya luasan genangan dan kawasan banjir hingga 75 % dari kondisi saat ini
- Meningkatnya kinerja lembaga pengelola persampahan dan drainase
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan persampahan dan drainase
- Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar sektor dan antar wilayah dalam pembangunan persampahan dan drainase
- Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pembangunan persampahan dan drainase

#### **c) Pagu dan Realisasi Program**

Program peningkatan kinerja pembangunan persampahan dan drainase dengan pagu sebesar Rp. 1,000,000,000.00 dengan realisasi Rp. 968,292,700.00 (96,83%) secara rinci realisasi perkegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

#### **d) Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan**

Saluran drainase sebagai pematus air hujan secara optimal disebabkan antara lain masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase yang ada antara lain dengan membuang sampah secara sembarangan serta penanganan masalah banjir perkotaan masih secara parsial karena keterbatasan pembiayaan dan belum adanya sistem perencanaan induk drainase secara terpadu. Masih rendahnya kualitas pengelolaan manajemen dan teknis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang meskipun didesain dengan system Sanitary Landfill tetapi dioperasikan dengan system Open Dumping, sehingga menimbulkan akibat memburuknya kualitas lingkungan disekitarnya (pencemaran tanah, udara, air tanah serta air permukaan). Masih belum optimalnya kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sampah serta kesulitan dalam pengadaan lahan untuk program sampah secara terpadu

- Pengurangan sampah pada sumbernya dan Peningkatan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan seperti penerapan Sanitary landfill untuk TPA Malang Raya,
- Pembangunan dan perbaikan saluran air/plengsengan/drainase di Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Malang, Bondowoso, Banyuwangi, Bangkalan, Nganjuk, Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo, Blitar, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Kediri, Sumenep, Sidoarjo, Lamongan, Jombang, Kota Surabaya

#### **e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya**

##### **Permasalahan**

- Masih belum efektifnya penerapan '3R' (reduce, Reuse, Recycle) dalam upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya.
- Masih rendahnya kualitas pengelolaan manajemen dan teknis TPA yang 95% meskipun didisain dengan sistem Sanitary Landfill tetapi



dioperasikan dengan sistem Open Dumping, sehingga menimbulkan akibat memburuknya kualitas lingkungan disekitarnya (pencemaran udara, tanah dan air tanah serta air permukaan).

- Belum mantapnya sistem pembiayaan dan pengelolaan retribusi sampah, serta belum optimalnya upaya pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan cost recovery.
- Masih lemahnya kelembagaan institusi pengelola sampah.
- Masih belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sampah terpadu.
- Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematas air hujan, hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase, akibat dari rendahnya penegakkan hukum khususnya dalam perambahan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan.
- Belum mantapnya peraturan dan standar pengelolaan drainase.
- Penanganan masalah banjir perkotaan masih secara parsial dan tidak konseptual karena terbatasnya dokumen perencanaan induk dan perencanaan detail drainase yang seharusnya dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak.

#### **Upaya Pemecahan Masalah**

- Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan persampahan dan drainase hingga tahun 2011
- Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan air minum dan air limbah untuk masyarakat
- Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana persampahan dan drainase serta peningkatan kesadaran berperilaku hidup dan sehat (PHBS)
- Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dan drainase serta perbaikan saluran drainase primer dan sekunder guna pengendalian banjir di

perkotaan Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan persampahan dan drainase.

### **3) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan**

#### **a) Tujuan**

Meningkatnya pembangunan kawasan perbatasan dan percepatan perencanaan RTRW dimasing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta perencanaan detail wilayah/kawasan sehingga mendukung mengurangi kesenjangan antar wilayah

#### **b) Sasaran**

Tersusunnya dokumen identifikasi perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan di 11 Kabupaten

#### **c) Pagu dan Realisasi Program**

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan pagu sebesar Rp. 1,295.000.000.00 dengan realisasi Rp. 1.278.634.730.00 (98,74%) secara rinci realisasi perkegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

#### **d) Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan**

Dokumen identifikasi perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan di 11 Kabupaten

#### **e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya**

##### **Permasalahan**

Data perencanaan program pengembangan perbatasan tidak akurat

##### **Upaya Pemecahan Masalah**

Terpadunya pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai dengan perencanaan program Kabupaten/Kota

#### **4) Program Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

##### **a) Tujuan**

Meningkatnya pembangunan kawasan cepat tumbuh dan kawasan pesisir dan percepatan perencanaan RTRW dimasing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta perencanaan detail wilayah/kawasan sehingga mendukung mengurangi kesenjangan antar wilayah

##### **b) Sasaran**

Tersusunnya dokumen identifikasi perencanaan pengembangan insfrastruktur wilayah cepat tumbuh dan pesisir di 18 Kabupaten

##### **c) Pagu dan Realisasi Program**

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, pagu sebesar Rp 2.172.000.000.00 dengan realisasi Rp. 2.140.433.730.00 (98,55%) secara rinci realisasi perkegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

##### **d) Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan**

Dokumen identifikasi perencanaan pengembangan insfrastruktur wilayah cepat tumbuh dan pesisir di 18 Kabupaten

##### **e) Permasalahan dan Upaya Pemecahanya**

###### **Permasalahan**

Data perencanaan program pengembangan cepat tumbuh dan pesisir tidak akurat

###### **Upaya Pemecahan Masalah**

Terpadunya pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai dengan perencanaan program Kabupaten/Kota

## **5) Program Pengembangan Perumahan**

### **a) Tujuan**

Program ini bertujuan meningkatkan pengembangan, pengadaan, perbaikan perumahan dan permukiman yang layak dan sehat bagi penduduk miskin, antara lain meliputi :

- Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah atau penduduk miskin
- Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Rumah Sederhana, dan Rumah Sangat Sederhana yang layak dan sehat untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi penduduk miskin diperkotaan
- Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan mengembangkan mekanisme relokasi permukiman ke tempat yang layak, aman, dan sehat, serta mencegah penggusuran tanpa kompensasi yang adil dan layak
- Pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin, dan menyederhanakan prosedur perijinan, serta pengakuan hak atas bangunan perumahan rakyat dengan biaya murah dan cepat
- Penetapan regulasi yang mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab mengenai perumahan dan permukiman masyarakat miskin, termasuk kelompok rentan yang disebabkan oleh bencana alam, dan dampak negatif krisis ekonomi
- Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dikawasan kumuh, desa tradisional, dan desa nelayan
- Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat
- Fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam

- Pemberdayaan kelembagaan masyarakat dalam mengembangkan forum lintas pelaku untuk menyelesaikan masalah permukiman, khususnya bagi masyarakat miskin
- Revitalisasi kelembagaan lokal yang bergerak pada pembangunan perumahan rakyat, termasuk kelompok dana bergulir perumahan
- Pendirian rumah penampungan/panti untuk orang jompo, anak jalanan, anak terlantar, dan penyandang cacat/memiliki kemampuan berbeda serta masyarakat miskin didaerah bencana alam.

#### **b) Sasaran**

Sasaran dari Program Pengembangan Perumahan meliputi:

- Terealisasinya Pembangunan RSH sebanyak 127.833 unit sampai dengan tahun 2011
- Menurunnya luasan kawasan kumuh menjadi 62,1% dari kondisi Tahun 2011 (2012 Ha)
- Terciptanya kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak huni secara swadaya
- Terealisasinya pola subsidi perumahan yang tepat sasaran
- Terealisasinya kredit mikro bagi MBR untuk perbaikan dan pembangunan rumah baru

#### **c) Pagu dan Realisasi Program**

Program Pengembangan Perumahan, pagu sebesar Rp. 154,047,203,500.00 dengan realisasi Rp. 138,560,821,167.85 (89,95%) secara rinci realisasi perkegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

#### **d) Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan**

Untuk meminimalisasi dan mencegah makin berkembangnya kompleksitas permasalahan dalam pelayanan permukiman, maka diperlukan adanya penentuan target pada horison waktu tertentu. Proyeksi target capaian pelayanan dalam bidang permukiman didasari oleh beberapa landasan

komitmen maupun regulasi secara internasional maupun nasional yang merepresentasikan kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang. GNPSR juga dipicu oleh adanya tantangan kebutuhan rumah (back lock) pada tahun 2011 serta meningkatnya luas kawasan permukiman kumuh yang mencapai 2.012 Ha yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebaran back lock rumah sampai tahun 2011 di Provinsi Jawa Timur, Perkotaan sebesar 293 ribu unit rumah dan di Pedesaan sebesar 226 ribu unit sedangkan RTLH 860 unit rumah.

- Meningkatkan peran dan potensi para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman.
- Membangun sistem dan mekanisme penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman nasional.
- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap sumberdaya pembangunan perumahan dan permukiman.
- Memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau bagi segenap lapisan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah

Berdasarkan konsep GNPSR, penanganan backlog rumah diselesaikan sampai tahun 2020. Sedangkan strategi program pengembangan sejuta rumah dilaksanakan melalui 3 katagori pendekatan, yaitu :

- Pengadaan Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi dan Rumah Susun Sederhana Sewa/RUSUNAWA (proporsi program 20%). Pertumbuhannya diharapkan akan dapat meningkat 7,5% per tahun sampai tahun 2020.
- Rumah Swadaya (proporsi program 60%), pengembangan unit rumah baru secara swadaya. Pertumbuhannya diharapkan akan meningkat 2,5% per tahun hingga tahun 2020.

- Perbaikan perumahan dan lingkungan permukiman (proporsi program 20%), peningkatan kualitas/rehabilitasi ini diharapkan 2,5% per tahun sampai dengan tahun 2020.

Melalui pendekatan strategi program GNPSR tersebut diharapkan agar kondisi back-log perumahan dapat diatasi secara bertahap sampai terpenuhinya kebutuhan perumahan pada tahun 2020.

Program Kegiatan Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

- Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun dikota-kota metropolitan dan kota-kota besar (Pembangunan prasarana sarana dan utilitas (PSU) di Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Malang, Jember, Sumenep, Mojokerto, Bangkalan.
- Perbaikan jalan/saluran lingkungan permukiman di Kabupaten Ponorogo, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Jombang, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Lumajang, Banyuwangi, Sidoarjo, Mojokerto, Tuban, Madiun, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Kota Surabaya
- Peningkatan sarana prasarana permukiman kawasan khusus (Perbaikan jalan/saluran lingkungan dikawasan Perbatasan, Pengrajin, Nelayan, Tertinggal, Pondok Pesantren) di Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Jember, Situbondo, Bangkalan, Sampang, pamekasan, Sumenep, pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bojonegoro, Gresik, Kota Surabaya.
- Renovasi Gedung Utama Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah dapat mewadahi / menampung pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang serta Memanfaatkan ruang yang tersedia se-optimal mungkin, sehingga lebih berfungsi dan berpengaruh dalam peningkatan kualitas kerja. Dan juga adanya bangunan yang integrasi serta keterpaduan antara bangunan sekitar dengan bangunan yang terenovasi.

- Renovasi Gedung Sekertariat PKK Provinsi Jawa Timur (Multi Years). Agar Dapat mewadahi / menampung pelaksanaan kegiatan pada sekertariat PKK dan memanfaatkan ruang sehingga lebih berfungsi serta berpengaruh dalam peningkatan kualitas kerja dalam pelaksanaan program-program di Bidang PKK. Dan juga adanya bangunan yang dapat berintegrasi dengan bangunan sekitar.
- Renovasi Gedung Bakorwil Madiun. Dengan adanya Renovasi Gedung Bakorwil Madiun maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja di masing-masing bidang di Bakorwil Madiun dan memanfaatkan ruang seoptimal mungkin sehingga lebih berfungsi serta berpengaruh dalam peningkatan kualitas kerja. Dengan adanya bangunan ini juga dapat berintegrasi terhadap bangunan sekitar serta mewadahi seluruh kegiatan di Bakorwil Madiun.
- Renovasi Gedung VVIP Bandara Juanda. Kegiatan Renovasi Gedung ini supaya dapat mewadahi / menampung pelaksanaan kegiatan di Gedung VVIP Bandara Juanda dan memanfaatkan ruang sehingga lebih berfungsi serta berpengaruh dalam peningkatan kualitas layanan di Gedung VVIP Juanda. Adanya pembangunan ini agar dapat berintegrasi dengan bangunan sekitar.
- Renovasi Garasi Kendaraan Jagir. Kegiatan ini dapat mewadahi kendaraan yang telah dialokasikan penempatannya pada garasi yang terrenovasi dan memanfaatkan ruang yang telah disesuaikan dengan kebutuhan sehingga lebih berfungsi maksimal. Dan adanya bangunan ini dapat berintegrasi dengan bangunan sekitar.
- Renovasi Rumah Jaga Garasi Kendaraan. Kegiatan Renovasi Rumah Jaga Garasi Kendaraan Jagir adalah Sebagai sarana dalam penjagaan garasi kendaraan yang telah dialokasikan, memberikan fasilitas kenyamanan sebagai sarana tempat penjagaan garasi kendaraan dan memanfaatkan ruang yang telah disesuaikan dengan kebutuhan sehingga lebih



berfungsi maksimal serta adanya bangunan ini dapat berintegrasi dengan bangunan sekitar.

- Renovasi Masjid Agung Surabaya. Dimana Masjid Agung merupakan Masjid terbesar dan menjadi icon di Jawa Timur dan salah satu tempat Ibadah yang sering dikunjungi umat Islam se-Jawa Timur jika bertandang ke Surabaya, sehingga perlu adanya pemaksimalan dalam sarana serta prasarana di Masjid tersebut serta memberikan fasilitas kenyamanan sebagai sarana tempat Ibadah.
- Renovasi Halaman Utara dan Pengaspalan Halaman Barat Masjid Agung Surabaya. Dimana Masjid Agung merupakan Masjid terbesar dan menjadi icon di Jawa Timur dan salah satu tempat Ibadah yang sering dikunjungi umat Islam se-Jawa Timur jika bertandang ke Surabaya, sehingga perlu adanya pemaksimalan dalam sarana serta prasarana di Masjid tersebut serta memberikan fasilitas kenyamanan sebagai sarana tempat ibadah.
- Renovasi Halaman Selatan dan Sisi Barat Masjid Agung Surabaya. Dimana Masjid Agung merupakan Masjid terbesar dan menjadi icon di Jawa Timur dan salah satu tempat Ibadah yang sering dikunjungi umat Islam se-Jawa Timur jika bertandang ke Surabaya, sehingga perlu adanya pemaksimalan dalam sarana serta prasarana di Masjid tersebut serta memberikan fasilitas kenyamanan sebagai sarana tempat ibadah.
- Peninggian Saluran Sisi Barat Masjid Agung Surabaya. Masjid Agung merupakan Masjid terbesar dan menjadi icon di Jawa Timur dan salah satu tempat Ibadah yang sering dikunjungi umat Islam se-Jawa Timur jika bertandang ke Surabaya, sehingga perlu adanya pemaksimalan dalam sarana serta prasarana di Masjid tersebut dan memberikan fasilitas kenyamanan sebagai sarana tempat Ibadah.
- Pematangan Lahan Kawasan Parkir Makam Gus Dur supaya dapat mewadahi / menampung kendaraan pengunjung yang datang ke Makam Gus Dur dan memanfaatkan ruang disekitar area Pondok Pesanteren

serta makam Gus Dur sebagai lahan parkir sehingga lebih berfungsi serta berpengaruh dalam peningkatan kualitas layanan di area makam serta Adanya bangunan dapat berintegrasi dengan bangunan sekitar.

- Pembangunan, Pengembangan, dan Renovasi Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur (Multi Years) agar dapat mewadahi/ menampung pelaksanaan kegiatan masing-masing Bidang dan Biro di Jajaran Provinsi Jawa Timur yang berkantor di Jl. Pahlawan No.110, memanfaatkan ruang yang tersedia se-optimal mungkin, sehingga lebih berfungsi serta berpengaruh dalam peningkatan kualitas kerja serta bangunan yang integrasi serta keterpaduan antara bangunan sekitar dengan bangunan yang terenovasi.
- Pembangunan Ruang Tamu (Guest House) dan Ruang Pertemuan Gubernur Jawa Timur untuk mewadahi/ menampung pelaksanaan kegiatan Gubernur Jawa Timur di Gedung Graha Surabaya, memanfaatkan ruang yang tersedia dan berfungsi se-optimal mungkin dan adanya bangunan yang integrasi serta keterpaduan antara bangunan sekitar dengan bangunan yang terbangun.
- Pembangunan Gedung Kantor Laboratorium Keuangan Provinsi Jawa Timur untuk dapat mewadahi/ menampung pelaksanaan kegiatan pada Kantor Laboratorium Keuangan Provinsi Jawa Timur, memanfaatkan ruang sehingga lebih berfungsi serta berpengaruh dalam peningkatan kualitas kerja dalam pelaksanaan program-program di Laboratorium Keuangan Provinsi Jawa Timur dan adanya bangunan yang dapat berintegrasi dengan bangunan sekitar.
- Pembangunan Gedung Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur untuk dapat mewadahi/ menampung pelaksanaan kegiatan pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur, memanfaatkan ruang sehingga lebih berfungsi serta berpengaruh dalam peningkatan kualitas kerja dalam pelaksanaan program-program di Dinas

Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur, dan adanya bangunan yang dapat berintegrasi secara fungsi dengan bangunan sekitar.

- Renovasi Gedung Pemberdayaan Wanita eks. Gedung Asrama Putri untuk dapat mewadahi/ menampung pelaksanaan kegiatan pada Kantor Pemberdayaan Wanita eks. Gedung Asrama Putri Provinsi Jawa Timur, memanfaatkan ruang sehingga lebih berfungsi serta berpengaruh dalam peningkatan kualitas kerja dalam pelaksanaan program-program di Pemberdayaan Wanita Provinsi Jawa Timur dalam melakukan bimbingan guna peningkatan kualitas wanita di Jawa Timur, dan adanya bangunan yang banyak mengalami alih fungsi dari fungsi sebelumnya sebagai asrama putri menjadi kegiatan dalam pemberdayaan wanita
- Pembangunan Gedung Satkorlak untuk dapat mewadahi/ menampung pelaksanaan kegiatan pada Kantor Satkorlak Provinsi Jawa Timur, memanfaatkan ruang sehingga lebih berfungsi serta berpengaruh dalam peningkatan kualitas kerja dalam pelaksanaan program-program di Satkorlak Provinsi Jawa Timur, dan adanya bangunan dapat berintegrasi secara fungsi dengan bangunan sekitar.
- Pembangunan/ Renovasi Gedung KPID dan KPP untuk dapat mewadahi/ menampung pelaksanaan kegiatan pada Kantor Pembangunan/ Renovasi Gedung KPID dan KPP, memanfaatkan ruang sehingga lebih berfungsi serta berpengaruh dalam peningkatan kualitas kerja dalam pelaksanaan program-program di KPID dan KPP, dan adanya bangunan dapat berintegrasi secara fungsi dengan bangunan sekitar.
- Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni
- Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Bidang Permukiman pada Desa Miskin Tertinggal
- Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman

- Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman
- Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan
- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi.
- Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM)
- Dana Pendampingan PNPM di 10 Kabupaten

Dalam Memperluas Lapangan Kerja Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Memperdayakan Ekonomi Rakyat, Terutama Wong Cilik , Gubernur Provinsi Jawa Timur mencanangkan program hibah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Wong Cilik. Adapun pelaksanaanya Gubernur Jawa Timur bekerjasama dengan Kodam V/ Brawijaya, sedang Kodam V/ Brawijaya menugaskan Kodim di daerah untuk melaksanakan program ini dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Bidang Tata Bangunan hanya selaku pengawas serta pendampingan laporannya.

Program ini memiliki capaian hingga 65.000 di seluruh Kabupaten/ Kota Jawa Timur, hingga tahun 2011 telah mencapai 50.000 rumah dan diharapkan pada tahun 2012 program ini dapat tercapai secara menyeluruh.

Daerah di Kabupaten/ Kota yang telah mendapatkan **sosialisasi Program** ini dapat dilihat dalam Tabel berikut :

No.	Tahun Anggaran	Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Anggaran (Rp)
1.	2009 (20.000 rumah)	Banyuwangi, Bojonegoro, Jombang, Lumajang, Pasuruan, Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Tuban.	Rp. 100.000.000.000
2.	2010 (15.000 rumah)	Mojokerto, Kediri, Sidoarjo, Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Lamongan, Malang, Gresik, Madiun.	Rp. 75.000.000.000
3.	2011 (15.000 rumah)	Pasuruan, Blitar, Malang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Bangkalan, Sumenep, Pamekasan, Sampang.	Rp. 75.000.000.000

NO.	SASARAN/INDIKATOR	2010		2011	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Perumahan yang terbangun	105.000 Unit	108.133 Unit	19.000 unit	19.250 Unit
2.	Pembangunan RUSUNAWA APBD I	1,5 TB	1,5 TB	3 TB	1,5 TB
3.	Pembangunan Jalan Lingkungan	16 Km	16,78 Km	55 Km	56,8 Km
4.	Pelayanan Permukiman Kumuh Perkotaan	2200 Ha	2116 Ha	2116 Ha	2016 Ha

Jumlah Rumah Susun Sewa Terbangun : 148 blok

- Jumlah Hunian Terbangun Sebanyak : 7336 hunian
- Sumber dana :
  - APBN : 5936 unit hunian
  - APBD I : 399 unit hunian
  - APBD II : 150 unit hunian
  - PERUMNAS : 480 unit hunian
- Pembangunan rumah dari REI : 492.939 unit hunian
- Pembangunan rumah dari APBD I : 239 unit untuk bencana alam di Jember

#### e) Permasalahan dan Upaya Pemecahan

##### Permasalahan

- Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, yang disebabkan oleh :
  - Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman
  - Terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan
  - Belum mantapnya sistem pembiayaan perumahan
  - Terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak

- Lemahnya akses masyarakat terhadap sumberdaya kunci perumahan
  - Masih lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan
  - Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan.
- Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh, yang disebabkan oleh :
- Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman
  - Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman
  - Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana dan sarana kawasan
  - Lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
- Masih terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman di kawasan tertinggal, di kepulauan terpencil dan di kawasan perbatasan.
- Masih belum efektifnya penerapan konsep pengendalian permukiman melalui dukungan prasarana dan sarana dasar permukiman Kasiba/Lisiba.
- Kurang ditegakkannya aturan keselamatan bangunan dalam pembangunan gedung
- Masih diperlukannya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung, terutama di daerah rawan gempa yang berpenghuni.
- Masih rendahnya upaya peningkatan kualitas lingkungan kawasan Tradisional/Bersejarah.
- Masih belum efektifnya pelaksanaan teknis dan administratif pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan gedung dan rumah negara (GRN).

#### **f) Upaya Pemecahan Masalah**

- Merealisasikan pelaksanaan Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) melalui penyediaan hunian rumah sederhana sehat, rumah susun sewa, serta menyediakan prasana dan sarana dasar permukiman, dengan melibatkan semua stakeholders
- Meningkatkan pemahaman peraturan jasa konstruksi dan pembinaan teknis pengelolaan/pembangunan gedung negara

Mengembangkan teknologi tepat guna dalam pembangunan bidang perumahan permukiman.

### **6) Program Perencanaan Tata Ruang**

#### **a.) Tujuan**

- Meningkatkan efektifitas perencanaan tata ruang
- Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang

#### **b.) Sasaran**

- Terwujudnya kegiatan fasilitasi dan penyusunan rencana tata ruang wilayah di 38 Kabupaten/Kota
- Tercapainya perencanaan detail kawasan di 38 Kabupaten/Kota
- Tercapainya optimalisasi peran RTRW Provinsi Jawa Timur sebagai rujukan koordinasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah di 38 Kabupaten/Kota
- Terpenuhinya perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar di kawasan strategis dan cepat tumbuh di 31 lokasi wilayah kegiatan
- Terpenuhinya perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar di kawasan perdesaan dan perkotaan di 22 lokasi sistem jaringan wilayah perdesaan Kab/Kota
- Terpenuhinya perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar di kawasan perbatasan di 5 Kawasan

- Terpenuhinya pemenuhan ruang terbuka hijau publik di 21 wilayah kota besar dan metropolitan
- Terpenuhinya sinkronisasi program dan anggaran propinsi di 38 Kabupaten/Kota
- Tercapainya fasilitasi dan koordinasi antar penataan ruang Kabupaten/Kota
- Tercapainya pemanfaatan kawasan strategis provinsi
- Tercapainya pemanfaatan detail kawasan/wilayah tiap Kecamatan di Jawa Timur
- Tercapainya pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang di seluruh wilayah Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur
- Tercapainya sinkronisasi program sektoral dalam perwujudan struktur dan pola ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis propinsi di seluruh wilayah
- Tercapainya optimalisasi kelembagaan penataan ruang di seluruh wilayah Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur
- Tercapainya fungsi pengendalian kebijakan insentif-desinsentif tata ruang di 38 Kab/Kota
- Terpenuhinya perizinan pemanfaatan ruang di 38 Kab/Kota
- Terpenuhinya penyelesaian perselisihan dan/atau pengenaan sanksi permasalahan tata ruang di 38 Kab/Kota
- Terpenuhinya fasilitasi kerjasama tata ruang lintas kab/kota di 38 Lokasi
- Terpenuhinya pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang di 38 Kab/Kota
- Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang masing-masing Kecamatan dan Kawasan Strategis Propinsi/Kabupaten/Kota
- Terselaksakannya produk rencana tata ruang wilayah wilayah di 38 Kabupaten/Kota
- Fasilitasi percepatan tata ruang wilayah di 38 Kabupaten/Kota



### **c.) Pagu dan Realisasi Program**

Program Perencanaan Tata Ruang, pagu sebesar Rp. 6.600.000.000.00 dengan realisasi Rp. 6.401.120.935 (96,99%) secara rinci realisasi perkegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

### **d.) Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan**

- Fasilitasi Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang
- Pemaduserasian RTRW Provinsi Jawa Timur dengan RTRW kabupaten/kota
- Perencanaan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh
- Fasilitasi Perencanaan Wilayah Perdesaan/Perkotaan
- Perencanaan Wilayah Perbatasan
- Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan kota sedang, besar dan metropolitan

### **e.) Permasalahan dan Upaya Permasalahan**

#### **Permasalahan**

- Belum tuntasnya proses penyusunan substansi teknis serta legalisasi dokumen tata ruang di Kabupaten/Kota sehingga menghambat perencanaan pembangunan dibawahnya seperti perencanaan RDTR yang dipakai untuk perijinan
- Belum efektifnya penerapan regulasi maupun dokumen perencanaan tata ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang karena rencana detail yang dipakai untuk perijinan mayoritas belum direncanakan
- Masih tingginya kesenjangan pembangunan antar wilayah Pertumbuhan ekonomi hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu saja, yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan antar daerah

- Masih banyaknya Wilayah Tertinggal, yaitu wilayah yang masyarakatnya memiliki keterbatasan akses kepada pelayanan sosial, ekonomi dan politik serta terisolir dari wilayah sekitarnya
- Belum dikembangkannya Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, hal ini disebabkan oleh belum berkembangnya sinergitas serta kerjasama antar pelaku-pelaku pengembangan kawasan (pemerintah, swasta, masyarakat)
- Masih kurang terpadunya penataan ruang lintas perbatasan Kab/Kota sehingga terjadi kontradiksi penempatan ruang yang menimbulkan konflik antar wilayah
- Masih belum efektifnya peran dan fungsi Tim Koordinasi Penataan Ruang pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menunjang konsistensi penataan ruang sesuai dengan perencanaan yang telah mempunyai legalitas hukum

#### **Upaya Pemecahan Masalah**

- Mengoptimalkan peran Rencana Tata Ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah
- Mendorong peningkatan pemerataan pembangunan dengan percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah melalui pembentukan sentra-sentra baru.